



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 1 NOMOR 2 JUNI 2018

CURRICULUM 2013 IN RELATION TO EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA: WHY,
WHAT, AND HOW

Rusli

TINJAUAN KRITIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN
KARAKTER SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK
BAGI KADER PARPOL

Hasan Hanafi

PEMIKIRAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN IKHWANUL
MUSLIMIN PASCA MUSIM SEMI ARAB

Syawaluddin

OPTIMALISASI MANAJEMEN KEUANGAN
PENDIDIKAN DI INDONESIA

Hikmah

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS BERDASARKAN
PENDEKATAN SAINTIFIK KURIKULUM 2013 DI
KELAS VII MTs DDI JOLLE

Kasmah & Syamsir Bin Rukka

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF POLITIK

Restu Rahmawati



PASCASARJANA IAIN SORONG

PAPUA BARAT



PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Restu Rahmawati

Jurusan Politik, Fakultas Sosial Politik, Unuversitas 17
Agustus Jakarta, Indonesia

restu.rahmawati3@gmail.com

Abstrak

In contrast of early nineteen century when the school prohibition for indigenous people was executed, the early century of twenty started up the educational chance. Though the education permitted only for the children of priyayi, rich men and plutocrat, also Dutch government functionary. The queen Wilhelmina's policy that politically determinates the discretion for the need of education came along with the time when Islamic education institution gradually founded and dispersed in Java and Sumatera. As it was influenced by colonial government stability, this article covers the education project of Dutch colonial government and institutional Islamic education, includes political Islamic education policy with its intention.

Keywords: politic, Islamic education of Indonesia

PENDAHULUAN

Sejarah telah membuktikan bahwa, setelah masa-masa kerajaan, sebagaimana telah terbentuk di bumi nusantara ini, secara berlahan, kolonialisme belanda berusaha untuk menguasai bumi nusantara dengan berupaya untuk menguasai daerah-daerah di kepulauan yang merupakan cikal bakal Negara Indonesia. Pada mulanya, pemerintah belanda berusaha menguasai berbagai sektor, utamanya dunia perekonomian, melalui penguasaan sektor perdagangan Hindia Belanda atau yang kemudian dikenal dengan istilah VOC yang berlangsung sekitar tahun 1596 M hingga abad ke-19.¹

saha untuk mengekalkan kekuasaan pemerintahan belanda tersebut, dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan dan menerapkan pemerintahan yang akomodatif terhadap umat Islam yang pada saat itu merupakan komoditas kelompok terbesar di bumi Nusantara.² Sehingga dalam tataran praktek, para Gubernur jendral Belanda membiarkan hukum Islam berjalan di tengah-tengah Masyarakat. Sementara pada tataran teoritis, beberapa sarjana belanda mengemukakan, teori keberlakuan hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Nusantara. Mereka diantaranya adalah Salomon Keyzer sekitar tahun 1823-1868 dan Willen Christian Van Den Berg pada tahun 1845-1927. Mereka berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, meskipun tidak harus sama dengan apa yang dipaparkan oleh umat Islam yang berada di Timur Tengah.³

Dengan demikian, pemerintah belanda, telah memberikan kelonggaran dalam persoalan hukum Islam, dengan harapan, mereka mendapatkan simpati yang positif dari Umat Islam yang ada di Bumi Nusantara tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah belanda telah berusaha keras untuk mencapuri urusan ke-Agamaan penduduk pribumi, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Negeri belanda maupun di wilayah jajahan Hindia Belanda. Tujuan pemerintahan belanda adalah berusaha menghilangkan pengaruh Islam di Negerinya sendiri hingga daerah kekuasaan

¹ VOC adalah *Verenigde Oost Indische Compagnie*, yang kemudian VOC ini berganti pada abad pertengahan sekitar abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan belanda. Lihat di Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). 267

² Kebijakan yang akomodatif tersebut di aplikasikan kedalam bentuk kebijakan yang salah satunya adalah aspek hukum, dalam politik hukumnya, pemerintah belanda mengakui keberadaan Islam dan menghormati hukum yang berlaku didalam masyarakat muslim di bumi Nusantara tersebut.

³ J.F. Holleman, ed. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981), 2.

dan jajahan belanda tersebut, karena mereka menganggap bahwa Islam akan menghambat tujuan mereka dalam melakukan jajahan di wilayah mereka. Bahkan hal tersebut diperkuat lagi dengan dicetuskannya sebuah keputusan para raja yang menyatakan bahwa, pada tanggal 14 Februari tahun 1859 No.78 yang membenarkan para Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk mencampuri masalah Agama dan mengawasi setiap gerak gerik para ulama' jika di pandang perlu untuk keamanan dan ketertiban.⁴

Sehingga hal yang demikian menimbulkan berbagai pertentangan dari berbagai daerah, seperti di daerah Aceh yang lebih suka untuk memberlakukan hukum adat ketimbang hukum belanda waktu itu, mereka beralasan bahwa hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat berakar kepada kesadaran hukum mereka sejak dahulu, dan ini berhasil membuat masyarakat yang damai dan tertib.⁵

Masyarakat muslim awal abad ke-20, merupakan masyarakat yang sedang bangkit, mengenai periode ini. Riclefs mengatakan bahwa "suatu zaman baru sedang menyongsong" hal tersebut di tandainya dengan lahirnya gerakan pembaharuan Islam.⁶ Semua hal tersebut, juga berimplikasi terhadap implementasi pendidikan yang diterapkan di bumi nusantara ini, mengingat pendidikan merupakan sebuah upaya untuk mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap serta perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai dan ideology, pendidikan juga merupakan sebuah proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideology dan akidah, sehingga dengan demikian, pemerintah belanda sadar betul akan hal tersebut. Pendidikan pada saat itu mendapatkan kekangan dan dilarang untuk tumbuhberkembang di Nusantara ini. Mereka berharap, bahwa

⁴ Husnul Aqib Suminto, *Politik Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), 10.

⁵ Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). 35. Bahkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pada awal abad ke-20 tercatat telah tiga kali pemerintah kolonial belanda ingin menerapkan hukum barat untuk penduduk pribumi, *partama* pada tahun 1904 M ketika P.J. Idenburg yang kebetulan menjabat sebagai menteri kolonial belanda mengajukan rancangan undang-undang kodifikasi hukum perdata BW untuk semua penduduk Indonesia, *Kedua* pada tahun 1919 M ketika B. Pleyte mencoba untuk mengenalkan rancangan undang-undang tentang hak kepemilikan tanah pribumi berdasarkan hukum Eropa; dan *ketiga*, pada tahun 1923 M ketika F.J.H. Cowan membuat rancangan baru Univikasi KUH perdata untuk penduduk pribumi, namun semuanya di gagalkan oleh Van Vollen Hoven yang menginginkan penerapan hukum adat dalam masyarakat pribumi. Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari hukum Kolonial ke hukum Nasional*. (Jakarta: Rajawali Press, 1995). 123-130.

⁶ Helen N. Boyle, *Memorization and learning in Islamic Schools "comperative education review"*. vol.50.no.3. 2006. 478-499.

bangsa Indonesia menajadi bangsa yang lemah dengan janji kosong yang berikan oleh pemerintah kolonial belanda.

Dengan pendidikan yang rendah, maka belanda dapat dengan mudah untuk menghasut penduduk pribumi yang bertujuan agar mereka beranggapan bahwa, rakyat Indonesia akan sulit untuk mendapatkan kemerdekaan. Dengan harapan pemerintah belanda akan semakin lama lagi untuk menguasai bumi Nusantara.

PEMBAHASAN

A. Proyek Pendidikan Kolonial Belanda

Pada tahun 1899, C.Th. van Deventer⁷ telah menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “*Een eereschuld*” dalam bahasa Indonesianya adalah suatu utang kehormatan di jurnal belanda *de Gids*. Dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa Negeri belanda berhutang kepada bangsa Indonesia, dan hutang itu sebaiknya dibayar dengan memberikan perioritas utama dan memberikan skala perioritas kepada kepentingan rakyat dalam kebijakan pemerintah penjajah. Sehingga hal tersebut membawa dampak kepada dicetuskannya keputusan Ratu Wilhelmina⁸ tentang kesejahteraan di Jawa dan menekankan pentingnya kewajiban etis serta tanggung jawab moral terhadap negeri jajahan. Dengan demikian, politik etis (*ethische politiek*) secara resmi telah di sahkan.

Kebijakan tersebut berdampak kepada perubahan yang cukup mendasar di lingkungan penjajahan, sehingga Furnivall menyebutkan bahwa zaman ini adalah zaman “ekspansi, efisiensi dan kesejahteraan”. Implikasi penting dalam kebijakan ini adalah proyek pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan perluasan pendidikan gaya barat yang merupakan tanda resmi dilaksanakannya politik etis. Pendidikan yang dibentuk Belanda tentunya akan membawa dampak yang kepada semakin besarnya jumlah kelompok masyarakat terpelajar. Kelompok-kelompok pelajar dari sekolah Belanda kemudian terbentuk menjadi kelas sosial tersendiri dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami suatu perubahan. Pembukaan sekolah “dokter-jawa” yang dikenal dengan istilah STOVIA, dan

⁷ Adalah salah seorang ahli hokum yang pernah tinggal di Indonesia selama tujuh belas tahun dar tahun 1880-1897M.

⁸ Pada tahun 1890-1948.

kemudian menjadi sarana mobilitas sosial kelompok priyayi rendah, pedagang dan keluargakeluarga tertentu dipedesaan.⁹

B. Aspek kelembagaan pendidikan Islam pada abad 20

Kelembagaan pendidikan Islam awal abad ke-20, berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan pesantren,¹⁰ dan lembaga pendidikan madrasah, dengan menggunakan pola manajemen dan administrasi yang masih cukup yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Dimana para santri biasanya tinggal di pondok (*asrama*) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang bersifat tradisional, dan kitab-kitab umum, yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pondok pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar atau para santri yang jauh dari tempat asalnya. Dalam istilah lain dikatakan pesantren berasal dari kata pe-santri-an, yang mana kata ini berasal dari kata *santri* berarti

⁹ Menurut Jaarliks Verslag School tot Opleiding van Inlandse Arsten pada tahun 1904-1905, pendaftar dan lulusan dokter jawaatau STOVIA masing-masing berjumlah 743 dan 160 siswa, dari jumlah pendaftar tersebut, 146 orang berasal dari keluarga priyayi dan keluarga kaya, 278 dari keluarga priyayi rendahan dan keluarga menengah, dan 319 berasal dari kelas rendahan, hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan media untuk pergerakan mobilitas social masyarakat Indonesia.

¹⁰ Istilah Pondok berasal dari bahasa arab yaitu *funduq* (lihat di Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999). 564. Sedangkan dalam istilah lain dikatakan bahwa pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata *santri* berarti murid dalam Bahasa Jawa. Sedangkan Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab *funduq* (فندق) yang berarti penginapan. Abid-Albisri. Munawwir A Fatah. *Kamus Al-Bisri*. 564. Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004. 26. dan dapat diartikan tempat santri belajar. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kata santri berasal dari kata Cantrik bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut *pawiyatan*, Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat muridmurid belajar mengaji. Umi Chultsum. Windy Novita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kasiko, 2006). 531. Wahjoetomo. *Pesantren* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 70. Sedangkan secara istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan orang-orang Islam,. Haidar Putra Dauly, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004). 27.

murid dalam bahasa Jawa. Sedangkan menurut Zubaedi, pondok pesantren adalah salah satu model pendidikan yang berbasis masyarakat yang kemudian kita kenal dengan istilah perguruan swasta yang mempunyai kemampuan tinggi dalam berswakarsa, dan swakarya dalam menyelenggarakan suatu program Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk tatanan sosial melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bernuansa Islam. Sedangkan cita-cita kedua lembaga pendidikan tersebut adalah cenderung kepada tujuan yang normatif, yaitu bertujuan pada ke-Agamaan saja yang fokus kepada kemaslahatan akhirat semata.

Abad ke-20 kelembagaan pendidikan Islam, yang berupa lembaga pesantren dan madrasah, perlahan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sehingga mereka diarahkan, dan dituntut untuk melakukan langkah-langkah ke arah perwujudan visi dan misi kependidikan Islam yang sekaligus populis, berkualitas dan beragam. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kepada landasan paradigma pengelolaan manajemen yang didukung oleh langkah-langkah yang cukup strategis. Melalui suatu perwujudan visi dan misi lembaga kependidikan Islam tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat berkembang dan maju secara estafet sebagaimana yang diharapkan.

Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, juga berhadapan dengan berbagai macam faktor yang kompleks. Karena tiga lembaga pendidikan yaitu; Pesantren dan madrasah yang merupakan gerakan pembaharuan Islam (*Islamic reform movement*) serta sistem pendidikan belanda, merupakan tiga faktor penting yang secara bersama-sama menyediakan sebuah *environment* bagi kemunculan lembaga pendidikan islam yang berupa pesantren dan madrasah di Indonesia.¹¹

Madrasah di Indonesia, merupakan lembaga pendidikan yang sangat dinamis, interaksi madrasah dengan modernisasi yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mendorong untuk memunculkan lembaga-lembaga pendidikan Islam ideal yang bercirikan khas ke-Indonesia an.¹²

Pengawinan antar lembaga pendidikan Islam, seperti lembaga pendidikan pesantren, madrasah, dan juga eksperimen pendidikan Islam modern, telah menghasilkan lembaga-lembaga pendidikan Islam Indonesia dalam bentuk yang sekarang ini. Lembaga pendidikan Islam mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga hal tersebut diperkirakan terjadi sekitar abad ke-20, hal

¹¹ Arief Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 ; pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 73.

¹² Sebagai contohnya adalah sekolah Islam yang secara formal berbeda dengan madrasah yang pada akhirnya hal tersebut menjadi cikal bakal keragaman lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia

tersebut ditandai dengan banyaknya para santri yang dirkirakan mencapai jumlah lebih dari 300.000 orang.¹³

Proyek pendidikan pemerintah colonial belanda dimuali sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan demikian, kegiatan proyek ini membawa implikasi kepada kalangan yang sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan belajar di sekolah yang asal mulanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Sehingga pada beberapa decade setelah tahun 1816 M, pemerintah kolonialisme belanda membuka sekolah bagi anak-anak pribumi.¹⁴ Sekolah tersebut, didirikan untuk membentuk dan mencetak para administrator dari kalangan pribumi, dan hal ini di ikuti dengan mendorong para keluarga eropa untuk mengambil anak-anak priyayi belajar dan hidup dilingkungan keluarga eropa.¹⁵

Selain hal tersebut, pemerintah colonial belanda telah membuka sekolah guru untuk sekolah jawa dan sekolah “Dokter-Jawa” yang di peruntukkan bagi rakyat pribumui dalam hal pelayanan kesehatan.¹⁶ Namun usaha tersebut masih dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan rakyat priumi, sehingga pada tahun 1879 M, pemerintah kolonialisme belanda kembali membuka *Hoofdenschoolen* atau (sekolah para kepala), pendirian sekolah ini bertujuan untuk mendidik para anak bupati dan bidang administrasi.¹⁷ Proyek pendidikan ini berkelanjutan hingga pada masa pembukaan lembaga pendidikan dasar yang kemudian disebut dengan sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua yang dimulai pada tahun 1893.

Dalam dunia pendidikan Islam sendiri, implementasi modernisasi lembaga pendidikan juga terjadi, hal tersebut ditandai dengan adanya Mahmud Yunus pada sekitar tahun 1909 M yang merupakan salah satu tonggak bagi kemunculan modernisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut di implementasikan dengan didirikannya sebuah lembaga pendidikan “*Adabiyah school*” oleh Abdullah Ahmad yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama dengan menggunakan system berkelas, memakai bangku dan meja serta papan tulis.¹⁸

¹³ Martin Van Bruesion, *Kitab kuning, pesantren dan terkat- Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 25.

¹⁴ Arief Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 :pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. 101.

¹⁵ Robert van Neil, *The emergence of the modern Indonesia elite* (Dordrecht the Netherland: Poris Publication and KITLV, 1984), 28-29.

¹⁶ *Ibid*, 28.

¹⁷ *Ibid*, 27.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 63.

Adabiyah school tersebut menerapkan system kelas, mengkombinasikan mata pelajaran Agama dan umum, serta menggunakan metode proses belajar mengajar yang diadopsika dari sekolah Belanda.

Pendirian sekolah ini merupakan sekolah eksperimen, maka eksistensi sekolah ini hanya bertahan sekitar enam bulan yang kemudian berubah nama menjadi “HIS Adabiyah” yang ada di minangkabau.¹⁹ Oleh karena itu Abdullah Ahmad merasa kehilangan kesempatannya untuk mengadakan pembaharuan Agama,²⁰ karena sekolah yang dibangunnya sudah dikuasai oleh pemerintah colonial belanda.

Selain Adabiyah school lembaga pendidikan Islam yang lain juga didirikan, salah satunya adalah “Madras School” di daerah batu sangkar, yang didirikan oleh Syekh Umar Thalib, kemudian lembaga pendidikan Islam yang lain juga terbentuk dengan bernama “Diniyah Putri” di padang panjang yang didirikan oleh Rahmah al Yanusi.

C. Ketenagaan pendidikan Islam pada abad ke-20

Perkembangan pendidikan Islam, pada awal abad-20, tampil dengan wajah yang fenomenal dan beragam, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada akhir abad ke-19 dan sekaligus merupakan awal dari abad ke-20. Pemerintah kolonial belanda, telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan peluang bagi rakyat pribumi untuk bisa mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh diterapkannya politik etis ratu Ratu Wilhelmina pada tahun 1890-1948, sehingga pada akhirnya berimplikasi kepada dibukanya sekolah-sekolah yang diperuntukkan kepada para rakyat pribumi.

Salah satu sekolah yang memang di khususkan bagi pembentukan tenaga-tenaga administrasi adalah sekolah *Hoofdenschoolen* atau sekolah para kepala yang nantinya dipersiapkan bagi para pendidik bagi para putra Bupati dan lain sebagainya. Artinya dari sisi ke tenagaan, lembaga ini menghususkan bagi kalangan kepala sekolah untuk mengajar para keturunan bangsawan, sedangkan untuk keturunan pribumi tidak mendapatkan perlakuan tersebut.

¹⁹ Sekolah HIS ini adalah sekolah petama yang mendapatkan subsidi dari pemerintah belanda yang ada di daerah minangkabau. Lihat di Arief Subhan. *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 : Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. 107.

²⁰ Karel A Strembink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996), 41.

Jika ditilik dari aspek ketenagaannya, lembaga pendidikan Islam mulai dari Adabiyah School, kemudian Madras School, kemudian juga Madrasah Jamiatul Kahir yang didirikan di Jakarta. Semua lembaga tersebut sudah benar-benar dipersiapkan, ini dilakukan untuk memodernisasikan lembaga pendidikan Islam, hal tersebut dapat dilihat dari didirikannya (PGAI) atau Persatuan Guru Agama Islam pada tahun 1918 M, yang di prakarsai oleh Abdullah Ahmad dan para Ulama yang ada di Minangkabau.

Pada perkembangannya, organisasi ini kemudian mempunyai kekuatan politik yang dapat menekan pemerintah Belanda, terutama yang berkaitan dengan kebijakan politik pendidikan yang dianggap tidak adil. Bahkan pemerintah memperketat pengawasan lembaga pendidikan Islam, hal tersebut terlihat dari ditetapkannya *ordonas*²¹ yang menganggap lembaga pendidikan Islam sebagai “*wilde School*” atau sekolah liar.²² Selain itu, guru juga harus mempunyai izin dari pemerintah untuk melaksanakan tugas mengajar mereka.

D. Perencanaan Dan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda Pada Abad 20

Implementasi lembaga pendidikan Islam, bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkepribadian Islami. Artinya, yang memiliki pemikiran berdasarkan pada nilai-nilai Agama Islam, serta berjiwa sesuai dengan ruh Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Karena setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut, tentu akan dihindarkan. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, akan tetapi juga memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak. Rangkaian tersebut adalah tahap merealisasikannya sehingga dibutuhkan program pendidikan dan kurikulum yang selaras, serasi, dan berkesinambungan dengan tujuan di atas.

Beberapa paradigma mendasar bagi sistem pendidikan Islam, yang diantaranya adalah; *Pertama*, Prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan didasarkan pada akidah Islam. Dengan tujuan untuk membentuk sumberdaya manusia terdidik dengan ‘*aqliyah islâmiyah*’ (pola berpikir islami) dan ‘*nafsiyah islâmiyah*’ (pola sikap islami). *Kedua*, pendidikan harus diarahkan pada

²¹ Ordonasi adalah bentuk pengekangan pemerintah Belanda kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam dengan menganggap sekolah Islam adalah sekolah liar.

²² Arief Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, 110.

pengembangan ke-imaan, sehingga akhirnya akan melahirkan amal salih dan ilmu yang bermanfaat. *Ketiga*, pendidikan ditujukan dalam rangka membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi, baik yang ada pada diri setiap manusia yang selaras dengan fitrah manusia. *Keempat*, keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. *Kelima*, strategi dan arah perkembangan ilmu pengetahuan, *Keenam*, tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah dalam rangka untuk mengenal Allah SWT. *Ketujuh*, ilmu harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah SWT. *Kedelapan*, ilmu yang dipelajari ditujukan untuk menemukan keteraturan sistem, hubungan kausalitas, dan tujuan alam semesta. *Kesembilan*, ilmu dikembangkan dalam rangka mengambil manfaat dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. *Kesepuluh*, Ilmu yang dikembangkan dan teknologi yang diciptakan tidak ditujukan dalam rangka menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Mengingat lembaga pendidikan Islam yang ada, pada sekitar abad ke-20 masih tergolong kepada masih sedikit, dalam beberapa literature di jelaskan bahwa pada tahun 1922 M hanya ada sekitar 15 lembaga pendidikan Islam yang mengikuti system lembaga pendidikan seperti Diniyah School. Dan dapat dikatakan tergolong pada katagori modern, yang didalamnya memasukkan unsur-unsur pelajaran umum seperti Bahasa, Matematika, Sejarah, Geografi dan kesenian (Music).²³

Transformasi kebijakan materi pelajaran yang diterapkan di lembaga pendidikan seperti di Madras School tersebut, juga lebih menekankan pada muatan kurikulum bahasa arab, dengan harapan agar murid mampu mengakses pelajaran Islam pada sumber aslinya, karena kitab-kitab yang kemudian dijadikan rujukan dalam kegiatan pendidikan tersebut mayoritas menggunakan bahasa arab.

E. Politik Kebijakan Pendidikan Islam Pada Abad 20, Dari Sisi Anggaran Yang Diperuntukkan Untuk Lembaga Pendidikan Islam

Pada awal abad ke-20, di dunia muslim muncul kesadaran baru untuk melakukan reformasi pendidikan Islam secara komprehensif. Dan tidak terpisahkan dari usaha islamisasi ilmu dalam rangka membangun peradapan Islam di masa depan. Pada dekade itu, Indonesia terjadi masuknya gelombang

²³ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.*, 66.

sekularisasi besar-besaran sebagai imbas dari gelombang yang lebih besar dari skala global.²⁴

Ini berarti reformasi pendidikan Islam digagas oleh para pakar sebagai jawaban langsung terhadap arus sekularisasi yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Secara substantif, para pakar berusaha untuk mengadakan kegiatan reformasi pendidikan Islam dan mengembalikan pendidikan Islam kedalam pengaruh Islam, seperti pada masa kejayaan peradaban Islam.

Terkait dengan anggaran pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda, pemerintah hanya menanggung biaya oprasional lembaga pendidikan yang didirikan oleh belanda sendiri. Sedangkan lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat pribumi, mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk oprasional sekolah tersebut. Adapun salah satu lembaga pendidikan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial belanda adalah Adabiyah School karena keberadaan sekolah ini sudah diambil alih oleh pemerintah kolonial belanda.

F. Tinjauan politik pendidikan Islam dari sisi tujuannya

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki:

1. *Kepribadian Islam*, tujuan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang Muslim, yaitu keteguhan hati, dalam memegang identitas kemuslimannya dalam pergaulannya sehari-hari. Identitas itu, tampak kepada pada dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir (*'aqliyah*) dan pola sikap (*nafsiyah*) yang berpijak pada akidah Islam.
2. *Menguasai tsaqafah islamiyah dengan bandal*, Islam mendorong setiap Muslim untuk menjadi manusia yang berilmu dengan cara mewajibkannya untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran kewajibannya.²⁵
3. *Menguasai ilmu-ilmu terapan yang meliputi pengetahuan, ilmu, dan teknologi*, menguasai PITEK diperlukan agar umat Islam mampu mencapai

²⁴ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* (Jakarta: Erlangga 2005), 234.

²⁵ menurut al-Ghazali, ilmu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) ilmu yang fardlu 'ain, yaitu wajib dipelajari setiap Muslim seperti: ilmu-ilmu *tsaqâfah* Islam yang terdiri konsepsi, ide, dan hukum-hukum Islam (*fiqh*), bahasa Arab, sirah Nabi, Ulumul Quran, *tahfidz* al-Quran, Ulumul Hadits, ushul fikih, dll; (2) ilmu yang dikategorikan fardhu kifayah, biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan-keterampilan seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dll.

kemajuan material sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai *kehalifatullah* di muka bumi dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian Muslim apabila ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat seperti kedokteran, kimi, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dll.

4. *Memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdayaguna*, Penguasaan keterampilan yang serba material ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan umat Islam dalam rangka pelaksanaan amanah Allah Swt. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya *nash* yang mengisyaratkan setiap Muslim untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum dan keterampilan, sehingga hal ini dihukumi sebagai *fardhu kifayah*.

Tujuan pendidikan Islam, bukan hanya menjadi tempat pembekalan pengetahuan kepada anak bangsa, tapi juga lembaga penanaman nilai dan pembentuk sikap dan karakter. Anak-anak bangsa dikembangkan bakatnya, dilatih kemampuan dan keterampilannya. Sekolah tempat menumbuh kembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani secara maksimal, seimbang, dan sesuai tuntutan zaman. *Output* keseluruhan proses pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk bisa merealisasikan fungsi penciptaannya sebagai hamba Tuhan dan kemampuan mengemban amanah mengelola bumi untuk dihuni secara aman, nyaman, damai, dan sejahtera.

PENUTUP

Pada awal abad ke-20, merupakan kebangkitan umat Islam, pasalnya pada abad tersebut merupakan awal diberikannya peluang rakyat pribumi untuk mengenal yang namanya pendidikan. Jika pada masa decade sebelumnya, yaitu pada masa awal abad ke-19 ke belakang, rakyat pribumi dilarang untuk berskolah, karena mereka dianggap tidak pantas untuk mengenyam pendidikan, dan pendidikan hanya diperuntukkan bagi anakanak para kaum priyayi dan orang kaya serta para pejabat pemerintah belanda. Sehingga hal tersebut mengakibatkan semakin terlelaknya rakyat pribumi dalam buaian penjajahan belanda.

Namun berdasarkan keputusan Ratu Wilhelmina yang memberlakukan politik etis yang kemudian akhirnya memberikan ruang gerak bagi rakyat pribumi untuk bisa mengenyam dunia pendidikan, walaupun pada saat itu masih belum menyeluruh dan utuh, pasalnya lembaga pendidikan yang didirikan pada waktu itu masih terbatas kepada para anak-anak priyayi menengah kebawah,

seperti sekolah kedokteran-jawa dan *hofdenscholen* yang diperuntukkan oleh para anak-anak Bupati dan lain sebagainya.

Lembaga pendidikan Islam didirikan, yang terletak di minangkabau, yaitu Adabiyah School, kemudian disusul lagi dengan Madras School dan Madrasatul Khoir School dan lain sebagainya. Memberikan kiprah yang berkaitan erat dengan politik pemerintah kolonial belanda, sehingga stabilitas politik pemerintah membawa dampak dan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam pada abad ke-20 terutama di Indonesia. Maka dari itu, pada pembahasan tulisan ini meliputi proyek pendidikan kolonial Belanda, kemudian, aspek kelembagaan pendidikan Islam pada sekitar abad ke-20. Selain itu, ketenagaan pendidikan Islam pada sekitar abad 20 juga menjadi kajian dalam makalah ini. Dan perencanaan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa kolonialisme belanda pada abad ke20, serta politik kebijakan pendidikan Islam pada abad ke-20, dari sisi Anggaran yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan Islam dan juga tinjauan politik pendidikan Islam dari sisi tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A Strembink, Karel, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Al-Bisri, Abid dan Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, ArabIndonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Aqib Suminto, Husnul, *Politik Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Chultsum, Umi dan Windy Novita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Surabaya: Kasiko, 2006.

Dasuki, Hafizh dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Holleman, J.F. ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

N. Boyle, Helen, *Memorization and learning in Islamic Schools "comperative education review"*, vol.50.no.3, 2006.

Putra Daulay, Haidar, *Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasonal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Qomar, Mujamil, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Subhan, Arief, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20 (pengumpulan antara Modernisasi dan Identitas)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Van Bruesion, Martin, *Kitab kuning, pesantren dan terkat- Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999.

Van Neil, Robert, *The emergence of the modern Indonesia elite*, Dordrecht the Netherland: Poris Publication and KITLV, 1984.

Wahjoetomo, *Pesantren*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Wignjosoebroto, Soetandiyono, *Dari hukum Kolonial ke hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sabal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.